

STRATEGI DISPERINDAGKOP UKM DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGEMBANGAN HOME INDUSTRY DI INDONESIA

Oleh :

Nanik Pujiastuti dan Friendly Albertus

Dosen Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The purpose of the Indonesian state is as stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the fourth paragraph: "To protect the whole nation of Indonesia and the entire blood of Indonesia, to promote the common good, to educate the life of the nation, and to carry out the world order based on freedom, eternal peace and social justice". Executor of home industry development strategy in every District Government in Indonesia is based on Regulation of Minister of Cooperative and UKM. 06 of 2012 on the description of the main duties and function of structural positions in each SKPD in charge of the Cooperative and SMEs of the Regency and the City, the District and Municipal Government have the duty to assist the Central Government in exercising authority in the field of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs based on the principle of autonomy And co-administration tasks. Included in the home industry development.

In the implementation of home industry development strategy, there are supporting factors such as and good cooperation between the Central Government with the District and City Government as well as supporters such as institutions, banking institutions and other relevant practitioners, as well as a harmonious relationship with small entrepreneurs. There is also the factor inhibitors, such as, internal factor of Regency / City Government is the level of quality and quantity of apparatus is still limited, the amount of budget funds for the development of SMEs. As well as facilities and infrastructure are still inadequate. External inhibiting factors are the level of human resource quality is still limited, lack of entrepreneurial interest (no regeneration), high production prices whereas low purchasing power, handicraft and snack foods are still monotonous, as well as security conditions and unfavorable political situation.

Keywords: *Government, Regency and City, Home Industry.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam mewujudkannya maka dilaksanakan pembangunan, yaitu suatu perubahan yang terencana dari suatu kondisi nasional tertentu menuju kondisi yang lebih baik. Melalui pembangunan, kita bermaksud meningkatkan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan. Bagi bangsa Indonesia, pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sehingga pembangunan harus dilaksanakan secara merata di tanah air dan tidak hanya diberlakukan untuk beberapa golongan tertentu atau sebagian masyarakat tertentu saja. Hal ini untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Maka dari itu diperlukan strategi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan pendapatan nasional secara berarti dengan meningkatkan pendapatan perkapita dalam suatu periode perhitungan tertentu. Salah satunya dengan industrialisasi, yang diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2015, sebagian besar penduduk Indonesia atau sekitar 67,09 % bertempat tinggal di pedesaan. Pada umumnya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah bergantung pada hasil pertanian. Padahal seiring dengan kemajuan industrialisasi, lahan pertanian yang ada semakin sempit karena dipergunakan untuk perumahan serta kepentingan lainnya. Sehingga lahan pertanian yang ada semakin hari sudah tidak seimbang lagi dengan jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang ada di pedesaan.

Sementara itu industri-industri besar yang ada di daerah pinggiran kota, belum sepenuhnya mampu menampung dan menyerap tenaga kerja yang ada di desa-desa sekitarnya. Disamping daya tampung dari perusahaan-perusahaan yang terbatas, juga ada persepsi dari sebagian masyarakat desa bahwa bekerja sebagai buruh di perusahaan upahnya kurang sesuai dengan waktu atau jam kerja dan tenaga yang digunakan. Hal tersebut menyebabkan para tenaga kerja yang ada di wilayah sekitar lebih cenderung mencari pekerjaan lain. Dengan demikian sektor industri kecil termasuk home industri merupakan salah satu wahana yang dapat dikembangkan di daerah pedesaan. Karena sebagian besar populasi industri kecil dan kerajinan rumah tangga beralokasi di pedesaan,

sehingga jika dikaitkan dengan tenaga kerja yang semakin meningkat industri kecil merupakan jalan keluar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meratakan pendapatan penduduk desa.

Perkembangan industri kecil dan menengah terutama home industri hingga saat ini masih berjalan lamban dan belum bisa dikembangkan secara maksimal, karena pada kenyataannya kemajuan industri kecil dan menengah sangat kecil jika dibandingkan kemajuan yang sudah dicapai industri besar. Industri kecil dan menengah terutama home industri seringkali terabaikan hanya karena memiliki modal kecil, hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. Selain itu industri kecil dan menengah juga menghadapi ancaman persaingan yang semakin ketat ditandai dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar negeri yang memiliki kualitas dan harga yang lebih murah. Sehingga keberadaan industri kecil dan menengah, khususnya di sektor tradisional, berada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh industri berskala besar baik dari perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi saat ini terjadi krisis ekonomi global yang diawali bangkrutnya lembaga keuangan multinasional di Amerika Serikat sehingga membuat perekonomian dunia termasuk negara kita ikut terancam dan pastinya berdampak pada sektor riil khususnya industri kecil dan menengah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dalam pengembangan home industri?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi pengembangan home industri di Kabupaten Kutai Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam pengembangan home industri, sehingga diperoleh hasil guna perkembangan industri tersebut.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan strategi pengembangan home industri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan yang bersifat konstruktif dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan perkembangan home industri di Kabupaten Kutai Barat. Bagi peneliti, dapat melatih diri dalam memahami fenomena yang sedang berkembang di dalam masyarakat, sekaligus mencoba mempraktekkan teori yang diperoleh di perkuliahan. Sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan dan memperluas wawasan berdasarkan pengalaman dari apa yang ditemukan di lapangan.

II. KERANGKA DASAR TEORI

Dalam penelitian ini, strategi adalah semua keputusan untuk melakukan perubahan dan mencapai kondisi yang diinginkan organisasi di masa depan. Sehingga organisasi harus mampu menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Dengandemikian ciri utama strategi (Mudrajad Kuncoro, 2006:12) adalah Pertama, *goal-directed actions*, yaitu aktivitas yang menunjukkan "apa" yang diinginkan organisasi dan "bagaimana" mengimplementasikannya. Kedua, mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas), serta memperhatikan peluang dan tantangan.

Strategi memiliki dua perspektif yang berbeda (James A.F Stoner dan Charles Wankel, 2003 : 161) antara lain, (1) Apa yang hendak dilakukan oleh organisasi. Strategi didefinisikan sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Disini kata "program" mengacu pada peranan yang aktif, sadar, dan rasional yang dimainkan oleh manajer dalam merumuskan strategi organisasi. Dan (2) Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh sebuah organisasi, baik tindakannya sejak semula memang disengaja atau tidak. Strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Hadari Nawawi (2000:147) sendiri mengungkapkan strategi dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi.

Dari beberapa konsep mengenai strategi diatas, inti dari strategi adalah suatu cara atau usaha yang direncanakan secara sistematis dan disesuaikan dengan lingkungan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Konsep strategi yang paling mendekati dari beberapa konsep diatas adalah konsep dari Hadari Nawawi. Karena dalam penyusunan suatu strategi yang merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi, perlu disusun cara-cara atau usaha-usaha secara sistematis, dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan organisasi tersebut.

III. PEMBAHASAN

A. Bentuk Strategi Home Industry

Strategi pengembangan home industri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pembinaan dan pemberian bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan home industri batik tulis agar menjadi industri yang tangguh dan mandiri, sekaligus dapat melestarikan seni-budaya nasional.

Selanjutnya, fokus penelitian mengenai strategi pengembangan home industri akan mengacu pada siapa pelaksana strategi, bentuk strategi apa yang digunakan, tahapan strategi, dan bagaimana implementasi strateginya, serta faktor pendukung dan faktor penghambat strategi. Sehingga pelaksanaannya dapat diketahui secara pasti. Fokus penelitian yang menjadi acuan dalam pengembangan home industri di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengembangan home industri di Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti menjadi pengambil peran pemrakarsa dalam setiap program pengembangan home industri, mulai dari pembuatan kebijakan, pengaturan, penyusunan program sampai dengan implementasi dan evaluasi hasilnya.

Sebagai pelaksana dari strategi pengembangan home industri, maka Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki konsep tentang pengembangan home industri. Pada intinya pengembangan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia pengusaha kecil maupun pengrajin. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa apabila para pengusaha kecil memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka diharapkan mereka dapat mengelola usahanya secara benar dengan prinsip-prinsip manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan dengan baik. Sehingga diharapkan usahanya dapat tetap eksis dan semakin berkembang serta dapat menyerap banyak tenaga kerja. Apabilabanyak pengusaha kecil yang berhasil maka perekonomian Pemerintah Kabupaten/Kota secara keseluruhan akan ikut meningkat pula.

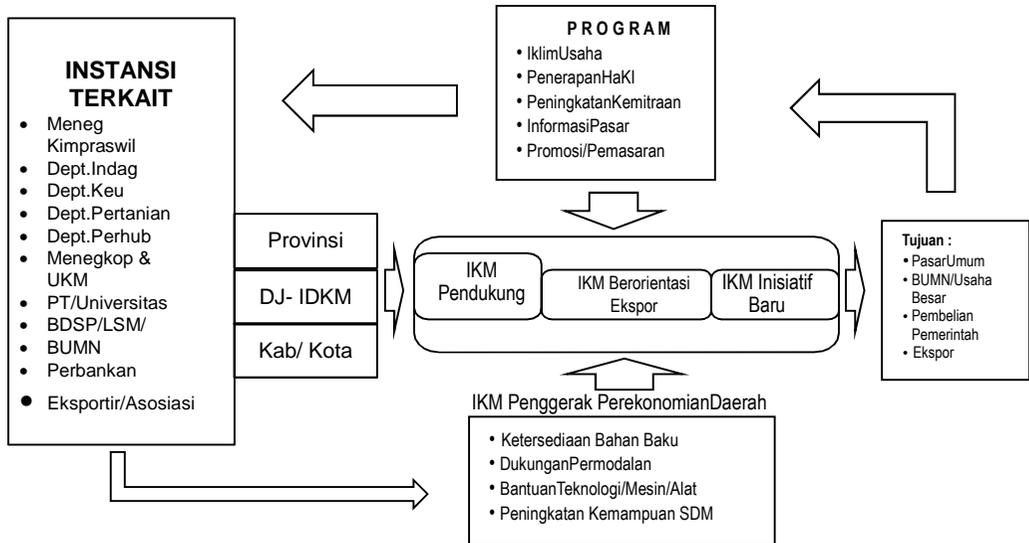
Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan pengembangan pada industri kecil yang sudah ada, bukan bertujuan untuk membentuk industri kecil yang baru. Industri kecil yang sudah ada tersebut, juga home industri mendapatkan pembinaan dan bantuan dari Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota, bertujuan agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengadakan pengembangan industri kecil di wilayah kerjanya yaitu di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Strategi yang digunakan Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan home industri berupa strategi yang bersifat *kontijensi*, yaitu dalam pemecahan masalah Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota akan memilih alternatif yang paling menguntungkan atau yang terbaik diantara yang terbaik, serta sesuai dengan petunjuk dan pedoman organisasi atasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota mengikuti petunjuk dari pusat mengenai strategi yang digunakan.

Berikut adalah bentuk strategi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) secara umum :

Gambar Strategi Pengembangan IKM

Demand Pull Strategy



Sumber : Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah Buku I

Pada gambar diatas merupakan gambaran umum pengembangan industri kecil dan menengah yang dilakukan pemerintah, industri batik tulis termasuk dalam IKM yang berorientasi pada ekspor, dimana pemerintah dengan instansi terkait baik ditingkat pusat maupun daerah mengembangkan IKM yang merupakan penggerak perekonomian daerah dengan berbagai program maupun strategi agar IKM dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Maka sesuai dengan peraturan yang ada dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dalam mengembangkan Home Industry (UKM), maka dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada program pengembangan IKM di Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain :

- Peningkatan Kemampuan SDM IKM antara lain pelatihan, magang, studi banding, bimbingan dan konsultasi.
- Peningkatan Teknologi dan Standarisasi berupa bantuan mesin peralatan, sosialisasi teknologi tepat guna, rekondisi mesin peralatan, penerapan sistem manajemen mutu, dan penyusunan standarnasional.
- Peningkatan Promosi dan Informasi antara lain pameran, Penyusunan dan penyebaran katalog, brosur, dan *leaflet*; penyusunan daftar IKM yang potensial, serta pembuatan *company profile*
- Peningkatan Permodalan antara lain fasilitasi pertemuan dengan perbankan, pemanfaatan dana masyarakat, dana bergulir melalui LPT Indag, dan dana dari donor luar negeri.
- Peningkatan Kerjasama Industri meliputi temu usaha dalam rangka dalam rangka kemitraan dan bantuan tenagaahli

- f. Pengembangan Iklim Usaha terdiri dari harmonisasi harga, analisis Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat perkembangan IKM, sosialisasi IKM, dan perlindungan *design* asli etnik Indonesia.
- g. Pengkajian, berupa kajian pendirian universitas IKM, kajian perkembangan produk IKM, study kelayakan pengembangan usaha.
- h. Penyelesaian Permasalahan Aktual, antara lain bantuan untuk industri IKM di daerah pasca bencana dan pasca konflik, baik berupa mesin peralatan, pelatihan, tenaga ahli, dan lain-lain.
- i. Program-program pendukung lainnya, antara lain sosialisasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), sosialisasi dan penerapan *cleaner production*, pengembangan klinik-klinik *Human Resource and Development (HRD)*, *design* dan kemasan; peningkatan teknologi dan mutu, serta pengelolaan lingkungan.

B. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung dalam penerapan strategi pengembangan home industri adalah terjalinnya kerjasama yang baik antara Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota, para pengusaha kecil, dan pihak lain yang mendukung. Faktor lainnya adalah semangat dan kemauan dari para pengusaha kecil untuk saling bertukar informasi sehingga memudahkan aparat Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan tugasnya yakni membantu para pengusaha kecil. Hal ini juga yang akhirnya menumbuhkan rasa kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

Kerjasama dari aparat Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota yang terbagi dalam 4 bidang, dimana setiap bidang memiliki peran sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi lepas tanggungjawab atau tumpang tindih dalam suatu masalah. Bidang Perindustrian yang membidangi teknis produksi, Bidang Perdagangan yang membidangi masalah pemasaran dan, Bidang Koperasi dan UKM yang membidangi masalah permodalan dan kelembagaan.

Selain itu kerjasama yang terjalin dengan instansi-instansi lain yang berkaitan, baik dalam maupun luar daerah juga mendukung dalam penerapan strategi pengembangan home industri, yakni (a) lembaga perbankan yang menjelaskan tentang prosedur dan pemberian pinjaman modal; (b) perusahaan atau instansi yang berperan dalam pemberian bantuan permodalan (PT. Garuda Indonesia, PT. Telkom, PT. PLN, PT. POS dan sebagainya); (c) Dinas Pariwisata, dalam hal mempromosikan produk unggulan Pemerintah Kabupaten/Kota; (d) Dinas Perindag dalam hal pemasaran produk di daerah lain; (e) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya yang turut serta membantu dalam pengembangan industri kecil ini.

IV. PENUTUP

Dalam mengembangkan home industri bentuk strategi yang digunakan adalah strategi *kontijensi*, dimana dalam pemecahan masalah Disperindagkop & UKM Pemerintah Kabupaten/Kota akan memilih alternatif yang paling menguntungkan atau yang terbaik diantara yang terbaik, serta sesuai dengan petunjuk dan pedoman organisasi atasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menerapkan strateginya, Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota akan mengidentifikasi

dan menganalisis home industri, yakni melihat kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki oleh home industri, serta melihat peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan misinya.

Sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat, terdapat 3 strategi yang diterapkan oleh Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengembangan home industri meliputi :

1. Bimbingan dan Penyuluhan, meliputi (a) pengembangan ragam produk, (b) peningkatan kualitas produk, (c) penyuluhan perijinan, (d) pemasaran.
2. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi (a) manajemen permodalan dan keuangan, (b) teknik produksi, (c) kewirausahaan.
3. Pemberian Bantuan, meliputi (a) bantuan permodalan, (b) bantuan peralatan.

Dalam penerapan strategi pengembangan home industri, terdapat faktor pendukung yaitu adanya jalinan kerjasama yang baik antara Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak pendukung seperti instansi, lembaga perbankan dan praktisi-praktisi lain yang terkait, serta hubungan yang harmonis dengan pengusaha kecil. Ada pula faktor penghambat, seperti faktor penghambat internal dari Disperindagkop dan UKM Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu tingkat kualitas dan kuantitas aparat masih terbatas, jumlah anggaran dana untuk program pengembangan UKM. Serta sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang memadai. Faktor penghambat eksternal yaitu tingkat kualitas sumber daya manusia masih terbatas, kurangnya minat berwirausaha (tidak ada regenerasi), harga produksi yang tinggi sedangkan daya beli masyarakat rendah, hasil kreasi kerajinan dan makanan kecil masih monoton, serta kondisi keamanan dan situasi politik yang belum kondusif.

Faktor penghambat pada birokrasi, seperti kurangnya sinkronisasi antara kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksanaan di daerah, serta kurang terpadunya antara lembaga-lembaga terkait. Sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penyaluran dan pemanfaatan program-program dan bantuan kredit bagi pengusaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Cristian Lepelius & Gert Thoma. 2009. *Industri Kerajinan Rakyat Pendekatan Kebutuhan Pokok*. Jakarta : LP3ES.
- Crown Dirgantoro. 2010. *Manajemen Strategis : Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dawam Raharjo. 2009. *Transformasi Pertanian Industri dan Kesempatan Kerja*. Jakarta : UI Press.
- Dedi Haryadi, Erna Ermawati C & Maspiyati. 2008. *Tahap Perkembangan Usaha Kecil : Dinamika dan Potensi Pertumbuhan*. Bandung : Yayasan AKATIGA
- CST.Kansil. 2010. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Freddy Rangkuti. 2016. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.